



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.145, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Magelang. Purworejo.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN  
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Purworejo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai oleh PABU.001 dengan koordinat 07° 39' 01.192" LS dan 110° 08' 39.497" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBA.001 dengan koordinat 07° 37' 50.850" LS dan 110° 07'

- 31.212" BT yang terletak pada batas Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 36' 42.915''$  LS dan  $110^{\circ} 07' 15.673''$  BT yang terletak pada batas Desa Kalirejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Desa Pekacangan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
2. PBU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBA.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 52.105''$  LS dan  $110^{\circ} 06' 38.264''$  BT yang terletak pada batas Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Desa Medono Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.003 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 32.797''$  LS dan  $110^{\circ} 06' 01.988''$  BT yang terletak pada batas Desa Sriwedari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Desa Mayungsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.1)  $07^{\circ} 34' 18.893''$  LS dan  $110^{\circ} 06' 09.709''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.2)  $07^{\circ} 33' 56.310''$  LS dan  $110^{\circ} 05' 29.261''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.3)  $07^{\circ} 34' 08.423''$  LS dan  $110^{\circ} 04' 51.879''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.003 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 35.041''$  LS dan  $110^{\circ} 04' 28.578''$  BT yang terletak pada batas Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Desa Kalijambe Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
  3. PBU.003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.004 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 15.580''$  LS dan  $110^{\circ} 04' 04.980''$  BT yang terletak pada batas Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan Desa Kalijambe Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kudil sampai pada PABA.005 dengan koordinat  $07^{\circ} 33' 48.696''$  LS dan  $110^{\circ} 03' 25.890''$  BT yang terletak di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidomukti Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Kudil sampai pada PABU.009 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 04.566''$  LS dan  $110^{\circ} 02' 39.737''$  BT yang terletak di Desa Wuwuharjo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dan Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

**Pasal 3**

**Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.**

**Pasal 4**

**Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 5**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

